

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – undangan

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SEMA Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana

Buku :

Adami Chazawi, **Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Djamaludin Ancok, **Dibalik Putusan Hakim : Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana**, Srikandi, Yogyakarta, 2005.

Effendi Perangin, **Hukum Waris**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

H.M.A Kuffal, **Sekedar Pendapat : Apakah Putusan PK Dapat Dilawan Dengan Pengajuan PK dan Hukum Pidana Orang Sakit Jiwa**, UMM Press, Malang, 2003.

Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan**, PT. Mandar Maju, Bandung, 2010.

Mangasa Sidabutar, **Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum**, Rajawali Press, 2001

Martiman Prodjohamidjojo, **Kitab Himpunan Peraturan – Peraturan Tentang Hukum Acara Pidana**, SIMPLEX, Jakarta, 1984.

Parman Soeparman, **Pengaturan Hak Untuk Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan**, Refika Aditama, Jakarta, 2007.

Suharto dan Jonaedi Efendi, **Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Sampai Persidangan**, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. **Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan menurut Undang – Undang**, Kencana: Renada Media Group, Yogyakarta,2005.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung nomor 434 K/PID/2003.

Putusan Mahkamah Agung nomor 97 PK/ PID.SUS/2012.